

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 (LKPJ 2018) ini disusun sebagai rangkuman seluruh pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Banggai, hal ini untuk memenuhi kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam menjalankan Misi Organisasi berdasarkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, kebijakan pemerintah pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai yang di dalamnya menggambarkan tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan dan pencapaian program kegiatan. Laporan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar bidang di lingkungan Dinas Sosial kabupaten Banggai.

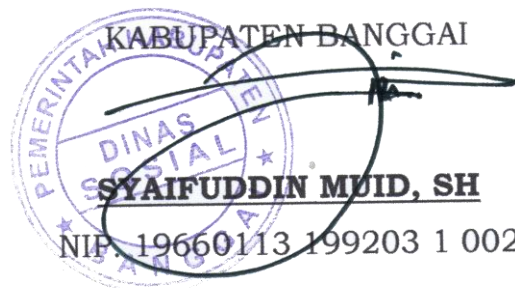
Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja.

Namun tetap disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.

Luwuk, 13 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGGAI



SYAIFUDDIN MUID, SH

NIP. 19660113 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
1.3 ISU STRATEGIS	5
1.4 LANDASAN HUKUM	7
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 RENCANA STRATEGIS	9
2.1.1 VISI	10
2.1.2 MISI	12
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN	12
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 PENGUKURAN KINERJA	24
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	25
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	26
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	35
BAB 4 PENUTUP	43



BAB

1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banggai, dimana sebelumnya berbentuk Kantor Sosial sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai. Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai sebagai berikut :

Dinas Sosial Kab. Banggai sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten
Banggai berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1.	Dinas Sosial	1	5	11	-		12	14		47

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

NO	SKPD	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1.	Dinas Sosial	-	4	28	-	15		-	47

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Sosial sebagai unsur penyelenggara pelayanan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

Sosial Kabupaten Banggai, Dinas Sosial Kabupaten Banggai mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :



Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sosial



Penyusunan program kegiatan di bidang sosial

Pelaksanaan pencegahan timbulnya permasalahan



social, gender, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pemberian bantuan sosial



Pengelolaan kesejahteraan sosial terpadu dan berlanjut



Pengkoordinasian kegiatan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial, Organisasi Perempuan dan Organisasi Masyarakat lainnya.



Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain tingginya ekspektasi terhadap layanan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kab. Banggai dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kab. Banggai dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kab. Banggai serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kab. Banggai Tahun **2011-2031** diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai.

Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kabupaten Banggai.

Tabel 1.3
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Di Kabupaten Banggai

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2016)	Jumlah (2017)
1	Anak Balita Terlantar	orang	1	1
2	Anak Terlantar	orang	970	970
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang		
4	Anak Jalanan	orang	-	-
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	15	15
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	1	1
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	405	405
8	Penyandang Disabilitas	orang	153	153
9	Tuna Susila	orang	50	50
10	Gelandangan	orang	2	2



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

11	Pengemis	orang	1	1
12	Pemulung	orang	2	2
13	Kelompok Minoritas	orang	-	-
14	Bekas warga binaan lembaga	orang	-	-
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	24	24
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	15	15
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang		
18	Korban bencana alam	orang	35	35
19	Korban bencana sosial	orang	3	35
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang	-	-
21	Keluarga Miskin	Jiwa	33464	152.198
22	Keluarga bermasalah psikologis	KK	-	-
23	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	-	-

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Banggai Tahun 2016-2021.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 yakni :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Banggai, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai, landasan hukum penyusunan LAKIP dan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai serta sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja)

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan atas berbagai capaian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017



BAB PERENCANAAN KINERJA II

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Banggai adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Banggai. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Banggai yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Nomor 460/135/Dinsos Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Banggai dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banggai tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banggai diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banggai telah melalui tahapan- tahapan yang simulan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banggai merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Banggai dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banggai tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Banggai yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Banggai dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

Banggai. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Banggai dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kab. Banggai yang Bermartabat serta unggul, nyaman dan sejahtera.

Dinas Sosial Kabupaten Banggai melaksanakan tugas di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan Visi : **“MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL”**.

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat termasuk PMKS menjadi berkesejahteraan sosial.

Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMD 2016 - 2021, dan sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang-undang Dasar 1945, pasal 34 disebutkan bahwa Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara. Undang-undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar, dimana kedua kelompok sasaran ini termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN
2019

meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS yang di dalamnya termasuk fakir miskin dan anak terlantar.

2.1.2 Misi

Sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Dinas Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Banggai menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial.
4. Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial.
5. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Melalui Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Profesionalisme Penanganan PMKS.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Dinas Sosial Kab. Banggai merupakan suatu pernyataan yang perlu dicapai secara kongkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan indicator yang dapat mencerminkan tingkat Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial Kab. Banggai. Berbagai indicator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur (Tangible). Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai.



Tabel 2.1

Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial2. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar	<p>Persentase LKS dan PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PMKS</p> <p>Persentase PMKS yang meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar</p>



2.2 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

2 . 2 P rogr am d an K egia tan

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangabangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

- a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

6. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- b. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
- c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
- d. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah keajahteraan sosial
- e. Pendataan, pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
- b. anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal



- c. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
- d. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- e. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- f. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- g. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- h. Pendampingan Keluarga Harapan
- i. Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
- j. Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

9. Program pembinaan anak terlantar

- a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Kabupaten Banggai anak terlantar

10. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- a. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
- b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

11. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

12. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

- a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
- b. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial



- c. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
- c. Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan Sosial
- d. Peringatan Hari Pahlawan dan Penyerahan Bingkisan

2 . 3 Rencan a Ki nerj a Ta huna n

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2019. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2019 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Banggai, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 terlampir.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Tabel 2.3.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Anggaran Tahun 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Sumberdana APBD

Rencana Tahun 2019						Hasil Analisis Kebutuhan		
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.06.1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					977.062.830		977.062.830
01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luwuk	Jumlah materai yang digunakan	1.500 Lbr	6.600.000	1.500 Lbr	6.600.000
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Luwuk	Jumlah rekening pembayaran jasa kantor	4 Rek	108.900.000	1 Thn	108.900.000
08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luwuk	Jumlah petugas kebersihan yang dibayarkan	3 Org	122.774.768	2 Pkt	122.774.768
11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luwuk	Jumlah foto copy dan jilid	2 Pkt	23.237.500	2 Pkt	23.237.500
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Luwuk	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Pkt	19.540.840	1 Pkt	19.540.840
15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Luwuk	Jumlah	1 Thn	3.300.000	Thn	3.300.000
17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Luwuk	Tersedianya Makanan dan Minuman	2.200 Dos	40.700.000	2.420 Dos	40.700.000
18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Luwuk	Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan Dinas	2 Ls	201.600.000	2 Ls	201.600.000
19		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Luwuk	Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan Dinas	2 Org	133.409.722	2 Org	133.409.722
20		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Luwuk	Terbayarnya honor PNS dan Jasa Pegawai tidak Tetap	12 Org	273.000.000	20 Org	273.000.000
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA					1.222.513.650		1.222.513.650
	APARATUR							
03		Pembangunan gedung kantor	Luwuk	Tersedianya bangunan gedung kantor	1 Unit	-	1 Unit	-
05		Pengadaan kendaraan dinas operasional	Luwuk	Tersedianya kendaraan dinas Untuk meningkatkan Pelayanan Publik	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000
07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Pkt	250.000.000	1 Pkt	250.000.000
09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Pkt	570.253.650	1 Pkt	570.253.650
10		Pengadaan Meubelair	Luwuk	Tersedianya Meubelair	1 Pkt	150.000.000	1 Pkt	150.000.000





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Rencana Tahun 2019					Hasil Analisis Kebutuhan			
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.06.1	01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				977.062.830		977.062.830
	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luwuk	Jumlah materai yang digunakan	1.500 Lbr	6.600.000	1.500 Lbr	6.600.000
	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Luwuk	Jumlah rekening pembayaran jasa kantor	4 Rek	108.900.000	1 Thn	108.900.000
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luwuk	Jumlah petugas kebersihan yang dibayarkan	3 Org	122.774.768	2 Pkt	122.774.768
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Luwuk	Jumlah jenis alat tulis kantor	1 Pkt	44.000.000	1 Pkt	44.000.000
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luwuk	Jumlah foto copy dan jilid	2 Pkt	23.237.500	2 Pkt	23.237.500
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Luwuk	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Pkt	19.540.840	1 Pkt	19.540.840
	15	Penyediaan Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang-undangan	Luwuk	Jumlah	1 Thn	3.300.000	Thn	3.300.000
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Luwuk	Tersedianya Makanan dan Minuman	2.200 Dos	40.700.000	2.420 Dos	40.700.000
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan Dinas	Luwuk	Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan Dinas	2 Ls	201.600.000	2 Ls	201.600.000
	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Luwuk	Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan Dinas	2 Org	133.409.722	2 Org	133.409.722
	20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Luwuk	Terbayarnya honor PNS dan Jasa Pegawai tidak Tetap	12 Org	273.000.000	20 Org	273.000.000
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA					1.222.513.650		1.222.513.650
	03	APARATUR						
	03	Pembangunan gedung kantor	Luwuk	Tersedianya bangunan gedung kantor	1 Unit	-	1 Unit	-
	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Luwuk	Tersedianya kendaraan dinas untuk meningkatkan Pelayanan Publik	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000
	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Pkt	250.000.000	1 Pkt	250.000.000
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Pkt	570.253.650	1 Pkt	570.253.650
	10	Pengadaan Meubelair	Luwuk	Tersedianya Meubelair	1 Pkt	150.000.000	1 Pkt	150.000.000





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Rencana Tahun 2019							Hasil Analisis Kebutuhan	
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN					94.217.750		94.217.750
01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Luwuk	Terzediannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	13.173.000	4 Lap	13.173.000
02		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Luwuk	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		-	1 Pkt	-
03		Penyusunan pelaporan prognostis realisasi anggaran	Luwuk	Terzediannya laporan Prognostis realisasi anggaran	1 Pkt	8.640.500	1 Pkt	8.640.500
04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Luwuk	Terzediannya laporan akhir tahun	1 Pkt	7.525.500	1 Pkt	7.525.500
05		Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Luwuk	Terzediannya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	6 Dok	58.478.750	6 Dok	58.478.750
07		Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah	Luwuk	Terzediannya penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah	1 Pkt	-	1 Pkt	-
07	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/LEDA					-		-
07		Pemutakhiran sistem informasi data base	Luwuk	Terlaksananya Pemutakhiran sistem informasi data base	1 Pkt	-	-	-
08	PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN					244.018.000		244.018.000
07		Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa	Luwuk	Terpenuhnyajasa pengadaan barang dan jasa	1 Pkt	13.145.000	1 Pkt	13.145.000
02		Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Luwuk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sosial	1 Keg	230.873.000	1 Keg	230.873.000
11		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Luwuk	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1 Keg	-	1 Keg	-
05	Program Pemberdayaan Fakir Miskin (PM) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya					1.564.975.000		1.564.975.000
01		Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	Luwuk	Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan Teknis	1 Keg	48.000.000	1 Keg	48.000.000
02		Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin	Luwuk	Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS KUBE	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000
03		Facilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Luwuk	Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS KUBE	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Rencana Tahun 2019							Hasil Analisis Kebutuhan	
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Luruk	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	1 Keg	586.575.000	1 Keg	586.575.000
05		Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Luruk	Jumlah KPM yang memperoleh Pelatihan Keterampilan Berusaha	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000
06		Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Perkotaan	Luruk	Tersedianya bantuan KUBE FM Perkotaan	1 Keg	-	1 Keg	-
07		Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Perdesaan	Luruk	Tersedianya bantuan KUBE FM Perdesaan	1 Keg	-	1 Keg	-
08		Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau	Luruk	Tersedianya bantuan KUBE FM Pesisir dan pulau-pulau	1 Keg	-	1 Keg	-
09		Facilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu perkotaan	Luruk	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan stimulan RUTILAHU perkotaan	1 Keg	-	1 Keg	-
10		Facilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu perdesaan	Luruk	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan stimulan RUTILAHU perdesaan	1 Keg	-	1 Keg	-
11		Facilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pesisir dan pulau-pulau	Luruk	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan stimulan RUTILAHU pesisir dan pulau-pulau		-	1 Pkt	-
12		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin perkotaan	Luruk	Tertakzannya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin perkotaan	1 Pkt	-	1 Pkt	-
13		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin perdesaan	Luruk	Tertakzannya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin perdesaan	1 Pkt	-	1 Pkt	-
14		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin pesisir dan pulau-pulau	Luruk	Tertakzannya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin pesisir dan pulau-pulau	1 Keg	-	1 Keg	-
15		Pendataan dan Pengendalian Penanganan Fakir Miskin	Luruk	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian	1 Keg	80.000.000	1 Keg	80.000.000





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Rencana Tahun 2019							Hasil Analisis Kebutuhan	
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16		Pendataan dan pengkajian pelaksanaan penanganan fakir miskin	Luwuk	Tersedianya data masyarakat miskin	1 Keg	-	1 Keg	-
16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL					3.504.131.200		3.504.131.200
01		Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Luwuk	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penyandang Cacat Dan Lansia		-	1 Pkt	-
02		Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Luwuk	Jumlah Korban KTKPMB yang memperoleh Bimbingan Fisiko Sosial		-	1 Pkt	-
03		Pelayanan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)	Luwuk	Jumlah Tuna Sosial Yang Memperoleh Bimbingan Sosial		-	1 Pkt	-
04		Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Luwuk	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Pelatihan Keterampilan	1 Pkt	100.000.000	1 Pkt	100.000.000
05		Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana	Luwuk	Jumlah PMKS dan korban bencana yang mendapatkan pelayanan psikososial	1 Pkt	50.000.000	1 Pkt	50.000.000
06		Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre	Luwuk	Terlaksananya Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre	1 Pkt	-	1 Pkt	-
07		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Luwuk	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi PMKS	1 Pkt	746.012.200	1 Pkt	746.012.200
08		Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Luwuk	Terlaksananya mutu pelayanan PMKS	1 Pkt	-	1 Pkt	-
09		Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Luwuk	Terlaksananya koordinasi data penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	1 Pkt	-	1 Pkt	-
10		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Luwuk	Terlaksananya penanganan Rehabilitasi sedang/berat PMKS	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Rencana Tahun 2019								
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu		
						Indikator Sebelum	Indikator Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	
12		Pelindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Luruk	Cakupan penanganan bencana sosial	1 Keg	250.000.000	1 Pkt	250.000.000
13		Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam	Luruk	Cakupan penanganan korban bencana alam yang terdampak	1 Pkt	300.000.000	1 Pkt	300.000.000
14		Pendampingan Keluarga Harapan	Luruk	Tetapannya Peningkatan Korban Tindak Kekerasan (IKTK) dan Perdagangan Orang		1.608.119.000	1 Pkt	1.608.119.000
15		Pendataan, Pembinaan dan Pengalihan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Luruk	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pendataan, pembinaan dan pengendalian Rehabilitasi		100.000.000	1 Pkt	100.000.000
16		Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial	Luruk	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pendataan, pembinaan dan pengendalian Perijinan	1 Pkt	150.000.000	42 Pkt	150.000.000
17	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR					75.000.000		75.000.000
101		Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terdampak	Kab. Banggai	Tetapannya Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terdampak	1 Keg	-	1 Keg	-
102		Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar	Kab. Banggai	Tetapannya Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar	1 Keg	75.000.000	1 Keg	75.000.000
103		Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Kab. Banggai	Tetapannya Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	1 Keg	-	1 Keg	-
104		Pengembangan bakat dan keterampilan anak terdampak	Kab. Banggai	Tetapannya Pengembangan bakat dan keterampilan anak terdampak	1 Keg	-	1 Keg	-
105		Monev program pembinaan tenaga pembinaan anak terlantar	Kab. Banggai	Tetapannya Monev program pembinaan tenaga pembinaan anak terlantar	1 Keg	-	1 Keg	-
107		Bantuan sumbu bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal	Kab. Banggai	Tetapannya Pendataan Anak Terlantar	1 Keg	-	1 Keg	-
18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG cacat dan TARDUMA					100.000.000		100.000.000
01		Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Luruk	Tetapannya pendataan penyandang cacat	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000
02		Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Luruk	Satu paket Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	1 Keg	-	1 Keg	-
03		Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Luruk	Jumlah penyandang cacat dan penyakit kejiwaan memperoleh pelatihan	1 Keg	-	1 Keg	-





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Rencana Tahun 2019									
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kerucunan Dana/Pagu Indikatif Sebelum		Hasil Analisis Kebutuhan	
						1	2	3	4
04		Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Luwuk	- Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang memperoleh BMSOS, - Jumlah fasilitas alat bantu yang diserahkan, - Jumlah ODK yang memperoleh kebutuhan dasar - Jumlah ODK yang dikirim ke pusat rehabilitasi	1 Keg	50.000.000		1 Keg	50.000.000
05		Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Luwuk	- Jumlah Kader RBM (rehabilitasi berbasis masyarakat) yang memperoleh bimbingan teknis, - Terlaksananya pelayanannya	1 Keg	-		1 Keg	-
06		Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan trauma	Luwuk	Terlaksananya pemberian bahan makanan/minuman penyandang disabilitas	40 Jiwa	-		40 Jiwa	-
07		Bantuan bahan makanan / gizi penyandang cacat dan trauma	Luwuk	Terlaksananya pemberian bahan makanan/minuman penyandang disabilitas	40 Jiwa	-		1 Keg	-
08		Bantuan stimulan bagi para penyandang cacat dan trauma	Kab. Banggai	Bantuan stimulan bagi para penyandang cacat dan trauma	1 Keg	-		1 Keg	-
19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO		Luwuk			34.650.000	-	-	34.650.000
01		Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Luwuk	Jumlah Gedung panti asuhan yang terbangun	1 Pkt	-		1 Pkt	-
02		Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Luwuk	Jumlah panti asuhan yang dihamb	5 Pant	-		5 Pant	-
03		Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Luwuk	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	5 Pant	34.650.000		5 Pant	34.650.000
04		Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Luwuk	Jumlah penghuni panti yang memperoleh pendidikan	5 Pant	-		5 Pant	-
05		Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Luwuk	Terlaksananya Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	5 Pant	-		5 Pant	-
06		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Luwuk	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Keg	-		1 Keg	-
07		Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan	Luwuk	Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan	5 Pant	-		5 Pant	-
20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)					200.000.000			200.000.000
01		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Luwuk	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit	1 Pkt	150.000.000		1 Pkt	150.000.000





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2019

Rencana Tahun 2019							Hasil Analisis Kebutuhan	
Kode	Urusan dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03		Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Luwuk	Terlaksananya pemantauan kemajuan eks penyandang penyakit sosial	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000
04		Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Luwuk	Terlaksananya bantuan Eks Penyandang penyakit sosial	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					1.634.489.420		1.634.489.420
01		Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Luwuk	Terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha		-	1 Keg	-
02		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Luwuk	Terlaksananya jejaring dan kerjasama pelaku dunia usaha	1 Keg	-	1 Keg	-
03		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Luwuk	Terlaksananya dukungan WKSMB	1 Keg	626.008.000	1 Keg	626.008.000
04		Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Luwuk	Terlaksananya pengembangan perlindungan sosial	1 Keg	782.446.420	1 Keg	782.446.420
05		Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Keuangan	Luwuk	Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Keuangan	1 Keg	-	1 Keg	-
06		Bingkisan keluarga/janda pahlawan, perintis dan anggota veteran	Luwuk	Terlaksananya Bingkisan keluarga/janda pahlawan, perintis dan anggota veteran	1 Keg	-	1 Keg	-
07		Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan Sosial	Luwuk	Terlaksananya Pemberdayaan sosial peranan keluarga	1 Keg	107.510.000	1 Keg	107.510.000
08		Peringatan Hari Pahlawan dan Penyerahan Bingkisan	Luwuk	Terlaksananya bantuan Pemberdayaan sosial masyarakat	1 Keg	118.525.000	1 Keg	118.525.000
JUMLAH						10.020.157.850		10.020.157.850



**2.4
Kierja**

Perjanjian

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator yang harus dicapai, maka pada Tahun 2019 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase LKS dan PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS	55.75 %
2.	Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar	Persentase PMKS yang meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar	64.61 %

Tabel 2.4.2

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %
2.	Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur yang layak fungsi	Sarana & Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100 %
3	Tersedianya sarana & Prasarana Aparatur yang layak Fungsi	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %
4	Meningkatnya Disiplin ASN & Administrasi Kepegawaian dilingkungan Dinas Perdagangan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.	Tersusunnya laporan Kinerja & Keuangan Tepat Waktu	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan kinerja dan Keuangan	100 %
6.	Terwujudnya Fasilitas & Koordinasi, Monitoring & Evaluasi didukung Data Bidang	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang	100 %
7	Tersedianya kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diproses/diagenda	100 %
8	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	100 %
9	Tersedianya Bahan pembersih dan jumlah tenaga kebersihan	Jumlah bahan pembersih & jumlah petugas kebersihan	100 %
10	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan	100 %
11	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	700 Lbr
12	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan Perundang Undangan	3 Terbitan
13	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman	100
14	Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dan Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	100
15	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	100
16	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	100
17	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda dua dan Roda Empat yang dipelihara	100
18	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100
19	Terfasilitasinya ASN yang Purna Tugas	Jumlah ASN yang purna tugas	1 Orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
20	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal	1 Orang
21	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian Dokumen Anjab, Evjab, SOP SKJ	2 Dok
22	Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Semester I Dan II	2 Dok
23	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap
24	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen LKJIP, Jumlah Laporan realisasi keuangan perbulan	1
25	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen, RKA,DPA, RENJA, RKAP, dan DPPA	5 Dok
26	Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Prog dan kegiatan	2 Lap

Penetapan Perjanjian Kinerja di atas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kab. Banggai yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2016-2021. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial Kab. Banggai sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam pemberdayaan sosial	%	Partisipasi PSKS sangat diperlukan guna membantu penanggulangan PMKS	$\frac{\text{Jumlah TKSK yang telah berperan aktif dalam penanganan PMKS}}{\text{Jumlah PSKS di Kabupaten Banggai}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Kriteria yang digunakan ialah TKSK yang menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta proaktif dalam penanganan PMKS
2	Menurunnya PMKS	Prosentase Penurunan PMKS	%	PMKS perlu mendapatkan perhatian	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS di Kab. Banggai}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Kriteria yang digunakan ialah Keluarga miskin yang mengalami peningkatan pendapatan/penghasilan dan penyandang cacat, lansia, anak terlantar, korban bencana Napza yang tertangani sebagian kebutuhan dasarnya.



BAB AKUNTABILITAS KINERJA 3



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kab. Banggai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Banggai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan misi pemerintah.

3.1 PENGUKURANKINERJATAHUN2019

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah diterbitkan sebelumnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kab. Banggai

TAHUN 2017

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Pada Pengukuran Kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi Pemerintah. Indikator kinerja output dan outcome inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Renstra.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai adalah baik berhasil dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2016 (%)	CAPAIAN TAHUN 2017			KET
				TARGET	Realisasi %	% Capaian	
1	2	5		6	10	11	12
1.	Meningkatnya kapasitas lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase LKS dan PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	100	55,75 %	54,11	97,06	
2.	Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar	Persentase PMKS yang meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar	90,67	64,61 %	63,84	98,81	

Selanjutnya pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2016 – 2021 yang dalam hal ini yaitu masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase LKS dan PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PMKS
Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pembinaan, pelayanan dan pemberian bantuan kepada LKS dan PSKS melalui kegiatan:
 - a. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo dengan jumlah pembinaan terhadap panti asuhan sebanyak 12 Panti dari 18 Panti asuhan yang ada di Kabuten banggai (66,67%)



- b. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap Lembaga Kesejahteraan Masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai diantaranya Karang Taruna sebanyak 337 Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 23 orang, Komunitas Adat Terpencil sebanyak 15 jiwa dan Kelompok-kelompok keagamaan sebanyak 10 kelompok.
 - c. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, kegiatan ini turut mendukung keberhasilan dari indikator ini melalui pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 69 Kelompok dengan 9 jenis bantuan dari target sebanyak 66 Kelompok dan 6 jenis bantuan sehingga kegiatan ini bisa terealisasi 95,65%
 - d. Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Pemberdayaan Sosial
 - e. Peringatan Hari Pahlawan dan Penyerahan Bingkisan.
2. Persentase PMKS yang meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pembinaan, pelayanan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, KUBE, KRSE dan PMKS lainnya melalui kegiatan :

- a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
- b. Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- c. Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
- d. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
- e. Pendataan, pembinaan dan pengendalian fakir miskin
- f. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
- g. Pemantauan Kemajuan Perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
- h. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
- i. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan.
- j. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- k. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS



- l. Pelatihan keterampilan dan prakter belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.
- m. Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian rehabilitasi sosial
- n. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana
- o. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- p. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- q. Pendampingan Keluarga Harapan
- r. Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- s. Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial Kab. Banggai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Nomor : 460/Kep.013/Dinsos/2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kab. Banggai Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kab. Banggai juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator



kinerja utama Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2018	2019		
				Target	Real	Capaian
1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	%	100	55,75	54,11	97,06
2	Persentase PMKS yang meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar	%	90,67	64,61	63,84	98,81

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kab. Banggai terjadi peningkatan pada indikator kedua yaitu persentase PMKS yang meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dimana pada tahun anggaran 2018 capaian kinerja hanya 90,67 sedangkan pada tahun anggaran 2019 terjadi peningkatan dengan capaian kinerja sebesar 98,81% atau meningkat sebesar 8,34%. Peningkatan ini terjadi karena Dinas Sosial selalu mengedepankan pelayanan terhadap PMKS yang sangat memerlukan bantuan baik bantuan peralatan usaha bagi keluarga miskin, bantuan rehabilitasi bagi disabilitas, anak dan lansia, pelayanan terhadap tuna sosial, KPO dan PANZA serta bantuan kepada korban bencana. Dari capaian indikator ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial Kab. Banggai telah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Bidang Kesejahteraan Sosial dengan baik walaupun belum mencapai target kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PMKS jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 Dinas Sosial bisa mencapai target 100% sedangkan pada tahun 2019 Dinas Sosial hanya bisa mencapai target sebesar 97,06%. Tidak bisa tercapainya target capaian kinerja pada tahun



2019 ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan Dinas Sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari adanya rasionalisasi anggaran sumber dana DBH.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :



Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kinerja

No	Nilai Capaian	Interpretasi
1.	> 100%	Tercapai Melebihi Target
2.	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Tercapai



Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kab. Banggai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, telah ditetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja (*outcome*).



Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Banggai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (Dua) sasaran.

Pada tahun 2019 ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis dan 2 (Lima Belas) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sasaran meningkatnya partisipasi PSKS dalam Penanganan PMKS ini memiliki Enam indikator yaitu :

1. Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS;

Dimana dalam menilai indikator tersebut kriteria yang digunakan ialah tingkat kedisiplinan dalam penyampaian laporan setiap bulan serta peran aktif setiap TKSK dalam menunjang setiap program atau kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai.

TKSK merupakan personil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI sebagai relawan sosial yang secara sukarela turut membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Jumlah personil TKSK disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada pada Kabupaten/Kota, dimana untuk Kabupaten Banggai terdapat 23 orang TKSK karena memiliki 23 kecamatan. Dinas Sosial Kabupaten Banggai selaku SKPD yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TKSK untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial RI yang merupakan salah satu bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).



Dalam rangka meningkatkan kinerja atau peran aktif para TKSK dalam penanganan PMKS, Dinas Sosial Kabupaten Banggai selama Tahun 2017 telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya, bimbingan teknis bagi seluruh personil TKSK, pemberian insentif tambahan bagi TKSK, serta pemantapan personil TKSK dalam penanggulangan PMKS. Indikator 1 ini dapat terbaca dari Terlaksananya Pendampingan Penyerahan bantuan sarana dan prasarana Panti Asuhan/Panti Jompo dengan 2 Panti yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana serta 23 Laporan TKSK yang selalu tepat waktu.

2. Persentase Karang Taruna yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS.

Melalui Program Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna Terhadap Generasi Muda hal tersebut dapat terbaca melalui 3 Karang Taruna yang berprestasi. Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat terus dilaksanakan melalui Pemberian Bantuan KUBE Karang Taruna.

3. Persentase Kelompok Keagamaan yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS

Melalui Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial dapat terlaksananya Pembinaan Dukungan Kegiatan beragama terhadap Kelompok Keagamaan, hal tersebut dapat terlihat dengan terlaksananya Dukungan Kegiatan beragama terhadap Kelompok Keagamaan melalui 4 Jenis bantuan beragama yang diberikan dan 32 Orang Jumlah Tenaga LK3 dan TKSK yang berperan aktif.

4. Persentase Pemberdayaan Sosial terhadap nilai-nilai Kepahlawanan.

Hampir setiap Tahunnya dilakukan kegiatan Peringatan hari Pahlawan dan penyerahan Bingkisan. Dalam kegiatan tersebut terdapat 5 Titik Kegiatan:

- Malam Hari Tgl 9 November tepatnya tengah malam dilaksanakan Renungan suci di TMP;
- Kegiatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dipusatkan di Lapangan Alun-Alun Luwuk;
- Setelah Upacara di Lapangan Alun-Alun dilanjutkan Upacara di TMP (Taman Makam Pahlawan);



- Setelah selesai Upacara di TMP dilanjutkan Upacara di Pelabuhan Lalong sekalian tabur bunga;
- Kegiatan Puncak dilaksanakan di Kodim Kegiatan Penyerahan Bingkisan bagi keluarga/ janda-janda Pahlawan, Perintis dan anggota Veteran.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.

5. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan

Dengan Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan Sosial terlaksananya sasaran kegiatan yakni terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian melalui 23 Karang Taruna, TKSK, dan KAT yang mendapatkan Pembinaan demi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

6. Persentase Penanganan Fakir Miskin dan KAT (Komunitas Adat Terpencil) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya untuk Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping social pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.

Sasaran Kegiatan I Tersedianya 4 Orang Tenaga Pendamping KAT di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Batui Selatan, Kec. Simpang Raya dan Kec. Nuhon.

Sasaran Kegiatan II Tersedianya sarana dan prasarana masyarakat KAT dengan indicator Kegiatan:

- Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni (8 KAT)
- Jumlah rumah pertemuan masyarakat KAT Kec. Batui selatan dibangun (1 Unit)
- Jumlah Peralatan Rumah Tangga KAT Kasur Busa dan Genset (36 Buah)
- Jumlah bantuan bibit Pertanian bagi masyarakat KAT Kec. Batui Selatan dan Kec. Nuhon (350 Bibit Durian, Mangga dan Jeruk).
-



- Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Miskin

Sasaran meningkatnya Pelayanan Keluarga Miskin ini memiliki Sembilan indikator yaitu :

1. Persentase Keluarga Miskin yang terpenuhinya sebagian kebutuhan dasarnya.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya untuk Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping social pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Fakir Miskin Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir dan pulau-pulau dengan indicator Kegiatan :

- Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang mendapatkan keterampilan perbengkelan, pertukangan, dan tata boga (30 Orang)
- Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang mendapatkan keterampilan Perbengkelan, Pertukangan, dan tata boga (30 Orang)
- Jumlah Fakir Miskin Pesisir dan pulau-pulau yang mendapatkan keterampilan Perbengkelan, Pertukangan, dan tata boga (30 Orang)
- Jumlah Kelompok Fakir Miskin Perkotaan yang mendapatkan bantuan perbengkelan, tata rias, tata boga, pertukangan dan mesin jahit (24 Kube)
- Jumlah Kelompok Fakir Miskin Perdesaan yang mendapatkan bantuan perbengkelan, pertukangan kayu dan batu, peralatan kue, peralatan menjahit, sensor rumput, peralatan cuci motor, peralatan salon kecantikan, sensor mini dan pandai besi (39 Kube).
- Jumlah Kelompok Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau yang mendapatkan bantuan perbengkelan, pertukangan kayu dan batu, peralatan kue, peralatan menjahit, sensor rumput, peralatan cuci motor, peralatan salon kecantikan, dan sensor mini (39 Kube).
- Jumlah KK Fakir Miskin Perdesaan yang mendapatkan stimulant RUTILAHU (20 KK)



- Jumlah KK Fakir Miskin Pesisir dan pulau-pulau yang mendapatkan stimulant RUTILAHU (48 KK)
 - Jumlah Kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian (3 Kelompok)
2. Persentase Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang tertangani

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dapat kita melihat sasaran kegiatannya yaitu terlaksananya Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan Indikator Kegiatan:

- Jumlah Penanganan Kasus bencana yang emergency (5 Kasus)
- Jumlah Penanganan Kasus Rehabilitasi yang emergency (20 Orang)

Untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada sasaran kegiatan Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial memiliki beberapa indikator Kegiatan:

- Jumlah Anak SLB yang mendapat Makanan Tambahan (18 Orang) Hal ini terlihat pada Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS

3. Persentase PMKS yang mendapatkan Pembinaan

Dalam Kegiatan Pembinaan dan pengendalian dengan sasaran kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Rehabilitasi Sosial terdapat 1 (Satu) indikator kegiatan yakni Jumlah PMKS yang mendapatkan Pembinaan dan Pengendalian Rehabilitasi Sosial (50 Orang).

4. Persentase Pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan tepat waktu.

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dapat kita melihat sasaran kegiatannya yaitu:

- Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- Terlaksananya Penanggulangan korban bencana alam

Untuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dapat kita lihat 2 (Dua) Indikator Kegiatannya yaitu :



- Cakupan penanganan bencana social yang tertangani (3 Lokasi)
- Jumlah Tagana yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana social (75 Orang)

Dan Untuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dapat kita lihat 2 (Dua) Indikator Keegiatannya yaitu :

- Cakupan Penanganan Korban Bencana Alam yang tertangani
- Jumlah Tagana yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam.

5. Persentase Pemberian bantuan terhadap KPM-PKH

Dalam Kegiatan Pendampingan Keluarga Harapan dengan sasaran kegiatan Terlaksananya Pendampingan Penyaluran KPM-PKH memiliki 1 (satu) indicator Kegiatan yakni Jumlah Pendamping yang berperan aktif terhadap Penyaluran KPM-PKH (51 Orang)

6. Persentase KPM-PKH yang mendapatkan Pembinaan.

Melalui kegiatan Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran kegiatan terlaksananya pembinaan dan pengendalian bantuan social kita dapat melihat indicator kegiatannya yakni jumlah KPM-PKH yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian (51 KPM-PKH)

7. Persentase Lansia yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya.

Dalam Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sasaran kegiatan Terlaksananya Pemberian Bantuan Bahan Makanan/Gizi lanjut Usia dan indicator kegiatannya yaitu Jumlah Lansia yang mendapat Bantuan (80 Orang).

Selanjutnya Dalam Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sasaran kegiatan Terlaksananya Peringatan Hari Lansia dengan indicator kegiatannya yaitu Jumlah Kegiatan dalam Peringatan hari Lansia/Komda Lansia dan Haul Lansia (2 Kegiatan).



8. Persentase Anak Terlantar yang meningkat Kualitas hidupnya.

Melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar pada Program Pembinaan Anak Terlantar terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal dengan indicator kegiatan Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti Pelatihan/Handicrap (15 Orang)

Untuk Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma pada program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma yang sasaran kegiatannya yaitu terlaksananya Peningkatan Kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dengan indicator Kegiatan Jumlah Penyandang cacat yang mampu hidup mandiri (20 Orang).

9. Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengalami perubahan Perilaku.

Dalam Kegiatan Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial melalui program Pembinaan eks penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya) yang sasaran kegiatannya, terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.

Adapun Indikator Kegiatannya yaitu Jumlah Pengguna Napza yang mengalami perubahan Perilaku (5 Orang).

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kab. Banggai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Banggai melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Sosial Kab. Banggai dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 8.218.880.945,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.026.035.610,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,09%,



dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 192.845.335,00, hal ini merupakan hasil efisiensi.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang secara langsung menunjang terhadap pencapaian target kinerja dan sasaran pada Dinas Sosial Kab. Banggai pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas
Sosial Kab. Banggai

Tahun 2017

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam Penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none">Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo:1. Jumlah panti yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	114,270	400101,630,400	101,630,400	100%



		<p>2. Jumlah Laporan TKSK yang tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial <p>1. Jumlah Karang Taruna yang berpartisipasi</p> <p>2. Jumlah Jenis bantuan beragama yang diberikan</p> <p>3. Jumlah Tenaga Pendamping LK3 dan TKSK yang berperan</p> <p>4. Jumlah Kegiatan Peringatan hari Pahlawan</p> <p>5. Jumlah KT, TKSK dan KAT yang mendapatkan Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. <p>1. Jumlah Pendamping KAT (Kec. Simpang Raya, Nuhon dan Batui Selatan</p> <p>2. Jumlah KAT yang mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni</p> <p>3. Jumlah Rumah Pertemuan Masyarakat KAT Kec. Batui Selatan dibangun</p> <p>4. Jumlah peralatan rumah tangga KAT (Kasur Busa dan</p>					
						Rata-rata realisasi anggaran	92,8



2	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Miskin	<ul style="list-style-type: none">• Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. <ol style="list-style-type: none">1.Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang mendapatkan Keterampilan perbengkelan, pertukangan dan tataboga2.Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang mendapatkan Keterampilan perbengkelan, pertukangan dan tataboga3.Jumlah Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau yang mendapatkan Keterampilan perbengkelan, pertukangan dan tataboga.4.Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang mendapatkan bantuan perbengkelan, tata rias, tata boga, pertukangan dan mesin jahit5.Jumlah Kelompok Fakir Miskin perdesaan yang mendapatkan bantuan perbengkelan, pertukangan kayu dan batu, peralatan kue, peralatan menjahit, sensor rumput, peralatan cuci motor, peralatan salon kecantikan, sensor mini dan pandai besi				
---	--	--	--	--	--	--



	<p>3 Meningkatkan Upaya-Upaya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	<p>6. Jumlah Kelompok Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau yang mendapatkan bantuan perbengkelan, pertukangan kayu dan batu, peralatan kue, Peralatan Menjahit, sensor rumput, Peralatan Cuci Motor, Peralatan Salon Kecantikan dan sensor mini</p> <p>7. Jumlah KK Fakir Miskin Perdesaan yang mendapatkan Stimulan RUTILAHU</p> <p>8. Jumlah KK Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau yang mendapatkan Stimulan RUTILAHU</p> <p>9. Jumlah Kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan Pembinaan dan Pengendalian</p> <p>• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p>				
	<p>4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bagi Korban Bencana</p>	<p>1. Jumlah Penanganan Kasus Bencana yang emergency</p> <p>2. Jumlah Penanganan Kasus rehabilitasi yang emergency</p> <p>3. Jumlah Anak SLB yang mendapat Makanan Tambahan</p> <p>4. Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian Rehabilitasi Sosial</p> <p>5. Cakupan Penanganan Bencana Sosial yang tertangani</p> <p>6. Jumlah Tagana yang berperan</p>				



	5 Meningkatkan Kualitas Hidup KPM-PKH	7.Cakupan Penanganan Korban Bencana Alam yang tertangani 8.Jumlah Tagana yang berperan aktif dalam Penanggulangan Bencana Alam 9. Jumlah Pendamping yang berperan aktif terhadap penyaluran KPM-PKH				
	6 Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Terhadap KPM-PKH	10.Jumlah KPM-PKH yang mendapatkan Pembinaan dan Pengendalian 11.Jumlah Lansia yang mendapat Bantuan 12.Jumlah Kegiatan dalam Peringatan Hari Lansia (Komda Lansia dan Haul Lansia) 13.Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti Pelatihan (Handicrap) 14.Jumlah Penyandang Cacat yang mampu hidup Mandiri 15.Jumlah pengguna NAPZA yang mengalami Perubahan Perilaku				

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
8	Meningkatnya pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia/Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti	117.902.500	152.517.500	145.771.350	95,58
		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				
		1. Kegiatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo	127.185.000	127.185.000	103.469.750	81,35
		2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	347.250.000	347.250.000	319.988.200	92,15
			Rata-rata realisasi anggaran			89,69
9	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :				
		1. Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	219.180.000	219.180.000	193.380.500	88,23
		2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	701.602.100	1.701.602.100	759.708.0990	44,65
		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Panti Persinggahan	1.267.702.000	1.267.702.000	1.62.221.400	83,79
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)/				
		1. Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	10.000.000.000	2.950.000.000	635.395.998	21,54
		2. Pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Banprop)	27.866.090.000	27.866.090.000	17.005.479.750	61,03
			Rata-rata realisasi anggaran			59,85

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
10	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan:				
		1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	262.889.800	262.889.800	229.803.950	87,41
		2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	113.955.000	113.955.000	72.081.500	63,25
Rata-rata realisasi anggaran						75,33

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2017 serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Banggai pada Tahun 2017.

3.2.4 Tingkat Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.19

Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	109,53	96,55	12,98
2	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang cacat	110	92,80	17,2
3	Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, Gepeng, dan Anak Jalanan)	117,57	90,48	27,09
4	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	107,78	94,40	13,38
5	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga	100	83,98	16,02
6	Meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum	66,67	97,99	-31,32
7	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam/sosial	100	93,54	6,46
8	Meningkatnya pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar	115	89,69	25,31

9	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	100	59,85	40,15
10	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	89	75,33	13,67

Pada tahun 2017 cukup banyak program dan kegiatan yang diluncurkan baik dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kementerian Sosial RI guna mengatasi permasalahan Penyandang Disabilitas. Capaian untuk peningkatan kemandirian penyandang Disabilitas ini sampai dengan Tahun 2017 mencapai 16,70% dari target 10%, dimana pada Tahun 2016 sebanyak 470 orang penyandang Disabilitas yang telah meningkat kemandiriannya dan pada Tahun 2017 sebanyak 454 orang dari jumlah penyandang cacat yang ada di Kabupaten Banggai berdasarkan hasil validasi data Tahun 2012 yaitu sebanyak 6.129 orang.

BAB PENUTUP 4



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2017. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kab. Banggai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial Kab. Banggai menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 6 indikator dengan nilai Target 55,64%, nilai Capaian **105 %** atau melampaui target

- Sasaran 2 terdiri dari 9 indikator dengan nilai Target 41,94%, nilai Capaian **115%** atau interpretasi melampaui target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (Dua) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran telah mampu melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kab. Banggai untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 8.218.880.945.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.026.035.610.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,09%.hal ini merupakan hasil efisiensi anggaran.